

INDOTEXTILES

The Indonesian Textiles, Apparel & Fashion Community Reference



Momentum dan Mendorong Inovasi Global di Industri Mode dan Tekstil

Industri tekstil saat ini tengah menghadapi lanskap bisnis yang terus berubah, lengkap dengan berbagai tantangan. Namun, kondisi yang dinamis ini juga membuka peluang besar, didorong oleh meningkatnya permintaan dari pasar berkembang, kemajuan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Untuk membantu pelaku industri beradaptasi dan menemukan jalur pertumbuhan, Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Autumn Edition akan digelar pada 2 – 4 September 2025 di National Exhibition and Convention Center, Shanghai.

Dengan meningkatnya jumlah pengunjung domestik dan internasional dalam beberapa edisi terakhir, pameran ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat perdagangan tekstil dan pertukaran inovasi terdepan di dunia.

Tiga Dekade Keunggulan: Memasuki Babak Keempat Intertextile Apparel :Edisi musim gugur 2024 menandai perayaan 30 tahun

Intertextile, dengan hampir 4.000 peserta pameran dari 26 negara dan wilayah, serta kunjungan lebih dari 100.000 orang — jumlah pengunjung internasional naik 29% dibandingkan tahun sebelumnya. Momentum ini berlanjut di edisi musim semi 2025, yang mencatat hampir 95.000 pengunjung dari 131 negara dan wilayah, atau naik 17%.

Ms Wilmet Shea, General Manager Messe Frankfurt (HK) Ltd, menekankan pentingnya pameran ini: “Pertumbuhan Intertextile dari dekade ke dekade membuktikan kemampuannya menghubungkan pemasok global dengan pembeli visioner. Meski pasar saat ini penuh ketidakpastian, jangkauan internasional pameran ini justru membuka peluang bisnis di seluruh rantai nilai tekstil. Fokus kami pada inovasi dan tren desain terbaru menjadi komitmen kami terhadap keberlanjutan dan transformasi digital. Ini terlihat di berbagai zona khusus, seperti Digital Solutions Zone, Premium Wool Zone, dan Verve for Design, yang menjadi tempat penting bagi pembeli untuk tetap mengikuti perkembangan. Sementara itu, inisiatif Texpertise Econogy memperkuat komitmen kami terhadap keberlanjutan dan transformasi digital — dua pilar masa depan industri.”

Sebagai salah satu platform pengadaan terbesar di industri ini, Intertextile Apparel terus menjadi pusat tren global melalui zona-zona beragam, seperti Accessories Vision, Beyond Denim, Functional Lab, dan SalonEurope. Di edisi 2024, dua zona baru juga diluncurkan: Econogy Hub, yang fokus pada solusi berkelanjutan, dan Digital Solutions Zone, sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan AI, blockchain, dan IoT dalam rantai pasok — yang kini membantu meningkatkan transparansi, mengurangi limbah lewat sampling virtual 3D, dan mengoptimalkan logistik dengan analitik prediktif.

Digital Solutions Zone: Wadah Inovasi Digital : Digital Solutions Zone dan sesi seminar terkait kini menjadi pilihan utama bagi peserta pameran seperti Quaternion, Shima Seiki, dan Symmpix, yang menampilkan inovasi seperti peramalan permintaan berbasis AI, sampling virtual 3D (yang dapat mengurangi limbah kain hingga 30%), dan paspor produk digital untuk mendukung praktik pengadaan yang etis.

Mr Herman Chan, General Manager Symmpix, mengatakan “Zona ini sangat sesuai dengan arah pengembangan kami. Kami bertemu pembeli yang mencari solusi transformasional — mulai dari AI generatif untuk desain hingga sistem produksi yang dipersonalisasi. Bahkan di hari pertama, kami sudah terhubung dengan klien yang ingin langsung mengaplikasikan solusi ini dalam bisnis mereka.”

Premium Wool Zone: Merespons Tren Pakaian Kustom dan Bahan Mewah : Meningkatnya posisi China sebagai produsen pakaian kustom kelas dunia telah mendorong permintaan akan kain mewah, baik dari individu maupun merek yang mengutamakan pakaian unik, penuh gaya, dan berkelas. Premium Wool Zone, yang identik dengan warisan dan kualitas, bersama Paviliun Milano Unica, menghadirkan 50 peserta pameran wol premium di zona SalonEurope. Beberapa nama ikonik yang tampil termasuk Abraham Moon & Sons (UK), Albini (Italia), Cavallo 1886 (Italia), dan Scabal NV/SA (UK) — semuanya memamerkan kain Eropa berkualitas tinggi yang sangat diminati pembeli asal Tiongkok.

Mr Federico Veronese, Sales Manager E.Thomas S.p.A, : “Sejak pertama kali ikut di tahun 1998, Intertextile Apparel sangat penting bagi kami. Kerjasama di industri tekstil itu vital, dan pameran ini membuka jalan bagi kami untuk terhubung dengan

pelanggan di Tiongkok. Italia dikenal dengan produk wol berkualitas tinggi dan kreatif. Pasar Tiongkok sangat penting bagi kami, dan kami berencana terus berinvestasi di sana.”

Premium Wool Zone pun terus berinovasi. Di edisi musim gugur tahun ini, area khusus Functional Suiting Display akan kembali dihadirkan, memungkinkan peserta pameran menampilkan lebih banyak potensi dan fleksibilitas material mereka.

Verve for Design: Jembatan Kreativitas Global dan Pasar Lokal : Verve for Design, yang menjadi wadah bagi tren pola dan motif terkini, kini menarik perhatian dunia mode Tiongkok, di mana para desainer muda mencari pola unik untuk mewujudkan ide kreatif mereka. Studio-studio seperti Atelier Mineeda (Jepang), Longina Phillips Designs (UK), dan PHN Studio (Argentina) ikut berpartisipasi, menghubungkan kreativitas global dengan kebutuhan lokal yang dinamis.

Ms Lucia Mu, Pattern Consultant PHN Studio, mengungkapkan “Arus pengunjung di Intertextile luar biasa. Kami terhubung dengan klien dari Tiongkok hingga Amerika Selatan yang mencari desain berkelanjutan — banyak dari mereka menggabungkan motif eco-friendly kami dengan bahan mereka sendiri untuk menciptakan koleksi yang berkesan.”

Musim gugur ini, zona ini akan kembali memberikan kesempatan bagi desainer dan studio dari seluruh dunia untuk bertemu langsung dengan produsen pakaian dan merek baru yang tengah mencari motif-motif inovatif.

Pameran ini diselenggarakan oleh Messe Frankfurt (HK) Ltd, Sub-Council of Textile Industry, CCPIT, dan China Textile Information Centre. Akan digelar bersamaan dengan Yarn Expo Autumn, CHIC, dan PH Value di National Exhibition and Convention

Center, Shanghai — menghadirkan keseluruhan rantai nilai industri tekstil dalam satu lokasi.

Info lebih lanjut:
www.intertextileapparel.com

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Autumn Edition 2025

Tanggal: 2 – 4 September 2025

Salam,
Tim Redaksi

ISI EDISI ke-94 Berita Utama

- Ekspor Serat Viskosa RI Kembali Terbuka Usai India Hapus Aturan QCO

Berita Terbaru

- Menegakkan Kedaulatan Ekonomi Lewat Regulasi Tekstil Nasional
- Pemerintah Perkuat Fondasi Industri Tekstil Lewat Penyusunan Grand Design Nasional
- Jaga Pasokan, Jangan Tutup Impor Bahan Tekstil yang Belum Diproduksi di Indonesia
- Kadin Sampaikan Curhatan Pelaku Industri Baja, Alas Kaki, dan Tekstil kepada Menkeu Purbaya
- Industri Tekstil 2025 di Persimpangan Jalan: Ketika Raksasa Satu per Satu Tumbang
- Pabrik Garmen di Pemalang Kembali Beroperasi, Ribuan Pekerja Dapat Harapan Baru
- Standar Hijau Jadi Batu Sandungan, Tekstil RI Terancam Kehilangan Pasar Eropa
- Kenaikan Upah 2026 vs Banjir Impor
- Akses Kredit Seret, Industri Tekstil Nasional Hadapi Tekanan Berat
- Pemerintah Kucurkan Pembiayaan Rp2 Triliun untuk Dorong Ekspor Tekstil dan Furnitur
- Fokus SDA, Pemerintah Tegaskan Tekstil RI Tak Dapat Fasilitas Tarif Nol Persen di AS
- Gelombang PHK Bayangi Industri Tekstil Nasional Sepanjang 2025
- Libur Nataru Hambat Pengapalan, Industri Tekstil Hadapi Risiko Denda Ekspor
- Industri Tekstil Minta Akses Tarif Lebih Ringan ke Pasar AS

- Harga Minimum Impor Dinilai Belum Cukup Lindungi Industri Tekstil Nasional

BERITA UTAMA

Ekspor Serat Viskosa RI Kembali Terbuka Usai India Hapus Aturan QCO



Peluang ekspor tekstil Indonesia ke pasar India kembali menguat setelah pemerintah Negeri Bollywood resmi mencabut aturan Quality Control Order (QCO) untuk produk viscose staple fiber (VSF) asal Indonesia pada akhir bulan lalu. Kebijakan tersebut langsung berlaku dan membuka kembali akses masuk produk RI yang sempat terhambat selama hampir dua tahun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut keputusan India menjadi momentum pemulihan ekspor serat buatan Indonesia. Menurutnya, pasar India merupakan salah satu jalur strategis bagi penguatan kinerja industri VSF nasional. Ia pun mendorong pelaku usaha untuk segera memanfaatkan peluang yang kembali terbuka tersebut.

Pencabutan QCO membuat produsen Indonesia tidak lagi diwajibkan mengantongi sertifikasi Bureau of Indian Standards (BIS) ataupun memenuhi standar ISO 17266:2019. Aturan sertifikasi yang ketat itu sebelumnya memperlambat masuknya produk VSF Indonesia dan menekan nilai ekspor secara signifikan. Data pemerintah menunjukkan nilai ekspor VSF RI ke India merosot tajam dari USD 110,72 juta pada 2022 menjadi hanya USD 14,03 juta pada 2024. Budi

menyebut pencabutan QCO merupakan hasil dari negosiasi panjang selama dua tahun, meliputi komunikasi teknis dengan otoritas India, pembahasan standar BIS, hingga pengajuan keberatan resmi melalui forum WTO.

Di sisi lain, industri garmen dan tekstil dalam negeri menilai pencabutan aturan QCO seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat produksi nasional. Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan tekstil dalam negeri sekaligus memperluas pasar ekspor. Namun, hambatan struktural, regulasi yang rumit, serta tuntutan pemenuhan standar global masih menjadi tantangan utama. Anne menilai penyederhanaan regulasi akan meningkatkan daya saing nasional dan turut membantu menekan maraknya praktik impor pakaian bekas atau thrifting yang membanjiri pasar lokal.

Ia juga menekankan bahwa impor masih dibutuhkan, terutama untuk bahan tekstil tertentu yang mensyaratkan teknologi khusus dan standar kualitas tinggi. Keterbatasan pengembangan produk pada sebagian pabrik dalam negeri membuat sejumlah merek global masih mengandalkan bahan impor. Meski demikian, Anne optimistis industri nasional mampu tumbuh lebih kuat jika pemerintah mempercepat harmonisasi kebijakan dan mendorong peningkatan kapasitas produksi. Pencabutan QCO oleh India dianggap sebagai salah satu peluang yang harus disambut dengan langkah konkret untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

**The Introduction ;
A history, journey and development
of the Indonesia
textile and garment industry**

INDOTEXTILES TV

The Indonesia Textiles, Apparel & Fashion Community Reference



intertextile

SHANGHAI apparel fabrics

2 – 4.9.2025

National Exhibition
and Convention
Center (Shanghai),
China

Join the
world's biggest
apparel textile
fair



BERITA TERBARU

Menegakkan Kedaulatan Ekonomi Lewat Regulasi Tekstil Nasional



Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tengah berada di persimpangan kritis. Permintaan akan sandang sebagai kebutuhan dasar masyarakat terus berlangsung, namun produsen dalam negeri justru terhimpit oleh gelombang impor. Produk fast fashion internasional dan pakaian bekas (thrifting) menyerbu pasar

lokal dengan harga tak wajar, melemahkan eksistensi pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Kondisi ini semakin pelik ketika dominasi China sebagai pemasok utama bahan baku hingga produk jadi membuat ketergantungan industri nasional semakin kuat. Gejalanya tampak jelas: meningkatnya impor benang, penurunan kontribusi sektor TPT terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), hingga penutupan pabrik dan meluasnya pemutusan hubungan kerja.

Dalam kondisi inilah, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tekstil hadir sebagai langkah politik hukum yang bukan hanya responsif, tetapi juga strategis. Regulasi ini diproyeksikan sebagai tameng legal untuk melindungi industri nasional dari praktik impor yang merusak persaingan. Lebih dari sekadar payung teknis, RUU Tekstil mencoba mengembalikan kedaulatan ekonomi dengan menata ulang ekosistem industri TPT agar lebih berdaya saing, mandiri, dan berkeadilan.

RUU Tekstil memperkuat kewenangan negara dalam mengendalikan impor melalui mandat hukum yang jelas. Pemerintah pusat diberi hak untuk membatasi atau melarang masuknya produk TPT berdasarkan pertimbangan perlindungan pasar domestik dan pembangunan industri nasional. Ketentuan yang mewajibkan seluruh produk impor berada dalam kondisi baru menjadi pukulan telak terhadap praktik impor pakaian bekas. Kebijakan ini bukan sekadar proteksi, tetapi upaya menciptakan persaingan yang adil, mengurangi dumping harga, serta memberikan napas bagi IKM lokal yang selama ini bertarung tanpa perlindungan memadai.

Namun, strategi defensif tidak cukup untuk membangkitkan industri tekstil nasional. RUU Tekstil mengambil langkah ofensif dengan mendorong pembangunan industri

dari hulu hingga hilir. Integrasi ini mencakup penyediaan bahan baku, teknologi modern, hingga infrastruktur produksi. Hal ini penting mengingat sebagian besar bahan baku tekstil di Indonesia masih diimpor, sementara banyak mesin produksi telah berusia tua dan tidak efisien. RUU ini juga menuntut pemerintah memberikan dukungan nyata, mulai dari permodalan, pelatihan, insentif, hingga promosi. Upaya tersebut diharapkan mengubah IKM dari sekadar produsen biasa menjadi pemain strategis yang mampu menghasilkan produk bernilai tinggi.

Perubahan paradigma juga diarahkan kepada konsumen melalui penjaminan standar kualitas. Dengan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara tegas dan terawasi, produk lokal diharapkan tidak lagi dipandang sebagai pilihan inferior. Jaminan kualitas dan keamanan produk menjadi alat penting mengikis stigma bahwa barang impor selalu lebih baik. Pada titik ini, RUU Tekstil memainkan peran budaya, membangun keyakinan kolektif bahwa membeli produk lokal bukan hanya bijak secara ekonomi, tetapi juga secara kualitas.

Pada sisi lain, sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci transformasi. Penurunan tenaga kerja dan rendahnya kompetensi menjadi hambatan serius bagi peningkatan kualitas produk. RUU Tekstil merespons hal ini dengan menyiapkan skema pengembangan SDM yang menyeluruh, mencakup pendidikan, pelatihan, hingga peningkatan kesejahteraan. Pelatihan diarahkan bukan hanya pada keterampilan teknis, melainkan juga manajerial serta produksi ramah lingkungan sesuai tren global industri hijau. Peningkatan kompetensi pekerja menjadi fondasi kokoh untuk menghasilkan produk berstandar internasional.

Secara keseluruhan, RUU Tekstil merupakan langkah visioner untuk menata ulang industri

tekstil nasional. Regulasi ini tidak hanya merespons persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek budaya dan kesejahteraan sosial. Keberhasilannya akan terlihat bukan sekadar dari menurunnya angka impor, tetapi dari bangkitnya industri lokal, terbukanya lapangan kerja yang layak, serta terbentuknya masyarakat yang bangga menggunakan produk dalam negeri.

Pada akhirnya, RUU Tekstil bukan hanya tentang bisnis sandang. Ia adalah perjuangan kedaulatan ekonomi yang menyangkut martabat bangsa, kelestarian budaya, dan keadilan bagi pelaku usaha lokal. Implementasi yang konsisten, pengawasan yang kuat, serta keberanian pemerintah melawan praktik merugikan akan menentukan apakah regulasi ini hanya akan menjadi teks dalam undang-undang, atau menjelma sebagai kekuatan yang menghidupkan kembali denyut industri tekstil nasional.

Pemerintah Perkuat Fondasi Industri Tekstil Lewat Penyusunan Grand Design Nasional



Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan kemampuan menyerap 3,75 juta tenaga kerja atau sekitar 19,16 persen dari sektor manufaktur, serta menyumbang devisa ekspor senilai USD 6,92 miliar, industri ini memiliki peran strategis bagi daya saing nasional. Namun, performa

sektor TPT pada triwulan III-2025 menunjukkan adanya tekanan, tercermin dari pertumbuhan PDB yang hanya mencapai 0,93 persen (yoy).

Tantangan tersebut semakin terlihat dari melemahnya daya saing, rendahnya pemanfaatan teknologi, hingga tren penurunan jumlah outlet tekstil lokal. Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menilai fenomena ini sebagai indikasi bahwa industri TPT membutuhkan pembaruan teknologi dan strategi agar tak tertinggal dari negara kompetitor.

Defisit neraca perdagangan dan disparitas utilisasi produksi—di mana kapasitas pakaian jadi tercatat 72,67 persen sementara tekstil hanya 51,71 persen—menunjukkan adanya masalah struktural yang harus segera diselesaikan. Untuk itu, pemerintah mendorong sinkronisasi kebijakan antara seluruh pemangku kepentingan melalui penyusunan grand design penguatan industri TPT.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Forum Kebijakan Strategis Bedah Hasil Kajian “Arah Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global” yang digelar Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Prospera. Kajian ini menyajikan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi industri, peluang, hambatan, hingga rekomendasi yang disusun secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga, asosiasi, pelaku industri, dan akademisi.

Melalui forum tersebut, pemerintah berharap hasil kajian dapat menjadi dasar kebijakan yang menjaga keberlangsungan industri, meningkatkan kontribusi terhadap PDB, serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Pada saat yang sama, masyarakat

diharapkan dapat menikmati produk tekstil terbaik dengan harga terjangkau.

Kajian tersebut menyoroti peluang besar dalam pengembangan high value garments dan bahan baku berkelanjutan—dua segmen yang tengah naik daun di pasar global. Namun, sejumlah tantangan struktural masih menghambat perkembangan, seperti kesenjangan kompetensi SDM, tingginya ketergantungan impor bahan baku, mahalnya energi dan logistik, lemahnya integrasi rantai pasok, hingga ancaman eksternal seperti overcapacity dan dumping dari Tiongkok.

Sebagai pijakan kebijakan, kajian ini melahirkan 20 rekomendasi yang terbagi dalam empat pilar utama. Beberapa rekomendasi prioritas mencakup penguatan proteksi pasar domestik, penataan tata niaga impor, peningkatan kemampuan memenuhi standar keberlanjutan global, serta pemanfaatan peluang IEU CEPA untuk memperluas akses ekspor ke Eropa.

Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi Kementerian PPN/Bappenas, Roby Fadillah, menegaskan bahwa Indonesia masih terjebak pada rantai produksi ber-nilai tambah rendah atau cut-make-trim. Transformasi diperlukan melalui peningkatan nilai tambah, baik di dalam sektor maupun lintas sektor. Menurutnya, sustainable fashion dapat menjadi strategi lompatan (leapfrog) yang efektif.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Rizky Aditya Wijaya, yang memastikan bahwa program prioritas dan quick wins TPT 2026–2029 difokuskan pada penguatan struktur industri, peningkatan daya saing global, serta percepatan transformasi menuju industri hijau, sirkular, dan berbasis digital.

Hasil forum ini akan menjadi bahan awal bagi Tim Kerja Revitalisasi Ekosistem Industri TPT lintas kementerian/lembaga dan menjadi masukan penting dalam penyusunan Strategi Nasional Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang lebih berkelanjutan, modern, dan berdaya saing di tingkat global.



Jaga Pasokan, Jangan Tutup Impor Bahan Tekstil yang Belum Diproduksi di Indonesia

Industri tekstil Indonesia kembali menegaskan pentingnya keberlanjutan pasokan bahan baku untuk menjaga operasional sektor padat karya ini. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) meminta pemerintah tetap membuka impor bahan baku tekstil yang belum diproduksi di dalam negeri, agar industri tidak terhambat akibat kelangkaan material.

Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, menyampaikan bahwa hal ini telah dibahas dalam rapat bersama Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 3 Desember lalu. Menurut Anne, pihak Bea Cukai memahami bahwa kawasan berikat didominasi perusahaan berorientasi ekspor dan selama ini patuh pada regulasi pemerintah. Ia menegaskan bahwa industri tidak menolak impor, tetapi berharap pemberdayaan produsen lokal tetap berjalan sambil membuka akses impor untuk kebutuhan yang belum dapat dipenuhi domestik.

Anne menilai bahwa industri membutuhkan regulasi yang adaptif, sederhana, dan sesuai kapasitas produksi riil. Aturan seperti rekomendasi impor dan perizinan dinilai harus disesuaikan dengan kondisi lapangan agar tidak menimbulkan kelangkaan bahan baku, terutama bagi sektor tekstil dan garmen yang sangat padat karya. Hingga kini, beberapa bahan baku—seperti kapas—masih sepenuhnya bergantung pada impor karena Indonesia belum menjadi produsen komoditas tersebut.

AGTI juga menyoroti dampak negatif thrifting terhadap industri dalam negeri. Untuk itu, sinergi antar-kementerian menjadi krusial agar kebijakan yang diterapkan tidak tumpang tindih dan justru memperburuk kondisi industri. Anne memberikan apresiasi terhadap langkah Bea dan Cukai yang dinilai semakin progresif, transparan, dan berbasis digital.

Di sisi lain, pemerintah tengah memperketat impor produk tekstil jadi karena dianggap merusak pasar lokal. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyebut bahwa produk tekstil impor dijual dengan harga sangat murah hingga mempersulit pelaku UMKM dan industri kecil menengah untuk berkembang. Ia menilai derasnya arus barang impor selama ini menjadi salah satu penyebab lesunya sektor tekstil nasional.

Di tengah upaya pemerintah membendung banjir impor produk jadi, industri berharap akses terhadap bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri tetap dijaga. Keseimbangan antara perlindungan pasar dan keberlangsungan produksi menjadi kunci agar sektor tekstil Indonesia dapat kembali pulih dan bersaing.

Kadin Sampaikan Curhatan Pelaku Industri Baja, Alas Kaki, dan Tekstil kepada Menkeu Purbaya



Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan beragam persoalan yang tengah menekan sektor baja, alas kaki, serta tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie, hadir bersama asosiasi dan pelaku usaha dari hulu hingga hilir di tiga sektor strategis itu.

Anindya menyebutkan bahwa salah satu isu utama yang dikeluhkan pelaku industri adalah persoalan impor, terutama pada sektor baja. Banyak pelaku usaha menegaskan perlunya ketegasan pemerintah dalam mengendalikan impor ilegal, sambil memastikan impor legal tetap mempertimbangkan kapasitas produksi domestik. Dorongan ini datang karena industri baja nasional kerap kalah bersaing akibat masuknya produk impor murah.

Sektor alas kaki turut menjadi sorotan. Industri ini dikenal sebagai penyumbang ekspor penting ke Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa. Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu seperti struktur pengupahan serta pemenuhan aspek lingkungan menjadi perhatian, mengingat standar keberlanjutan menjadi tuntutan pasar global.

Untuk sektor tekstil dan produk tekstil, Anindya menyampaikan bahwa pelaku industri berharap agar pemerintah memperketat pengawasan impor, terutama terhadap produk yang berpotensi merusak daya saing TPT lokal. Ia menegaskan industri TPT bukanlah industri senja, melainkan sektor yang masih bisa direvitalisasi jika kebijakan dan pengawasan berjalan efektif.

Selain permasalahan impor dan daya saing, inkonsistensi regulasi di kawasan pelabuhan juga mendapat perhatian serius. Mulai dari peraturan cukai hingga mekanisme pengawasan, seluruhnya dinilai masih menghadirkan tantangan bagi dunia usaha.

Pertemuan itu melahirkan sinyal positif dengan munculnya gagasan pembentukan task force khusus terkait deregulasi dan pemberian insentif bagi industri. Anindya menyebut rencana pembentukan satgas deregulasi dan satgas insentif tersebut sebagai langkah awal yang diharapkan dapat memberikan kepastian dan memperbaiki iklim usaha di ketiga sektor yang tengah tertekan.

Dengan masukan yang telah disampaikan, pelaku industri berharap pemerintah dapat memperkuat kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor baja, alas kaki, dan TPT, sehingga mampu menghadapi tekanan global sekaligus menjaga kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Industri Tekstil 2025 di Persimpangan Jalan: Ketika Raksasa Satu per Satu Tumbang

Tahun 2025 menjadi periode kelam bagi industri tekstil nasional. Satu per satu pabrik raksasa tekstil berguguran, menandai rapuhnya fondasi industri yang selama

puluhan tahun menjadi tulang punggung manufaktur dan penyerapan tenaga kerja. Minimnya permintaan domestik akibat banjir produk impor menjadi pemicu utama, mendorong kinerja keuangan perusahaan terperosok hingga berujung penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja massal.

Data Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mencatat sedikitnya lima pabrik tekstil hulu tutup sepanjang 2025. Dampaknya tidak main-main, ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Padahal, gelombang penutupan ini bukan fenomena baru. Dalam dua tahun terakhir, sekitar 60 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) telah menghentikan operasinya, termasuk Sritex Group, salah satu ikon industri tekstil Indonesia yang pernah menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja.



Pelaku industri menilai tekanan yang dihadapi sektor TPT kian kompleks. Salah satu faktor krusial adalah kebijakan tata niaga impor yang kerap berubah. Regulasi yang semula tertuang dalam Permendag No. 36/2023, lalu diubah menjadi Permendag No. 8/2024, hingga akhirnya direvisi kembali menjadi kebijakan impor berbasis klaster melalui Permendag No. 16–24 Tahun 2025, dinilai belum sepenuhnya efektif. Alih-alih membendung arus impor, kebijakan tersebut justru dianggap mempermudah masuknya barang impor tanpa persyaratan teknis yang ketat.

Revisi aturan impor memang sempat memberi harapan bagi pengusaha TPT, namun persoalan lama belum tuntas. Praktik impor ilegal melalui jalur tidak resmi masih marak dan memicu dugaan kuat adanya permainan mafia impor. Produk-produk seperti kain, benang, hingga pakaian bekas atau thrifting membanjiri pasar domestik dengan harga dumping. Kondisi ini membuat produk tekstil lokal sulit bersaing, arus kas perusahaan tersendat, dan efisiensi menjadi pilihan terakhir sebelum akhirnya gulung tikar.

Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil, menyebut tekanan tersebut berdampak langsung pada industri hulu tekstil yang mengalami penurunan produksi signifikan. Ia menilai situasi ini sebagai gejala deindustrialisasi dini. Penutupan lima pabrik sepanjang 2025, menurutnya, disebabkan kerugian serius akibat penjualan yang tidak maksimal di pasar domestik. Farhan bahkan memperingatkan potensi penutupan pabrik lain pada tahun berikutnya jika pemerintah gagal mengendalikan impor dan tidak membuka secara transparan data penerima kuota impor terbesar yang berkontribusi pada banjir produk asing.

Ia mengungkapkan, saat ini sedikitnya enam pabrik tekstil lainnya beroperasi dengan kapasitas di bawah 50 persen, bahkan beberapa di antaranya menjalankan produksi secara on-off. Lima mesin polimerisasi telah berhenti total. Banjir produk impor dengan harga dumping, terutama kain dan benang, disebut menjadi faktor utama runtuhnya daya saing industri dalam negeri.

Sepanjang 2025, sejumlah nama besar resmi menghentikan operasionalnya. PT Asia Pacific Fibers Tbk menutup permanen pabrik poliester di Karawang setelah utilitas produksi anjlok di bawah 40 persen dan dinilai tidak lagi layak secara teknis maupun komersial. Penutupan ini berdampak besar

pada penurunan penjualan dan memaksa perusahaan melakukan PHK terhadap ribuan pekerja. Sementara itu, PT Polychem Indonesia Tbk memutuskan menutup lini bisnis poliester secara permanen setelah menanggung kerugian berkepanjangan sejak pandemi Covid-19.

Tragedi terbesar datang dari Sritex Group. PT Sri Rejeki Isman Tbk resmi menghentikan operasionalnya pada 1 Maret 2025, mengakhiri perjalanan panjang perusahaan yang berdiri sejak 1966. Krisis keuangan dan kegagalan pembayaran utang menyeret perusahaan ke jurang kepailitan, menyebabkan hampir 11.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Salah satu anak usaha di sektor hulu, PT Rayon Utama Makmur, turut menjadi bagian dari daftar pabrik yang tutup tahun ini.

Nasib serupa dialami Sulindafin yang menghentikan produksi serat dan benang poliester, serta PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. SBAT, yang dikenal sebagai produsen benang daur ulang, tak mampu bertahan di tengah tekanan pasar dan beban keuangan yang kian berat.

Kaleidoskop industri tekstil 2025 menggambarkan sektor yang berada di persimpangan jalan. Tanpa perlindungan pasar domestik yang efektif, penegakan hukum terhadap impor ilegal, serta kebijakan industri yang konsisten dan berpihak pada penguatan produksi dalam negeri, industri tekstil nasional terancam terus kembang kempis. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia kehilangan salah satu pilar industrinya yang selama ini berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pabrik Garmen di Pemalang Kembali Beroperasi, Ribuan Pekerja Dapat Harapan Baru



Aktivitas industri garmen di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kembali menggeliat setelah sebuah pabrik yang sempat dinyatakan pailit kini resmi beroperasi kembali. Kebangkitan pabrik ini membawa angin segar bagi ribuan pekerja yang sebelumnya kehilangan mata pencaharian, sekaligus memulihkan denyut ekonomi masyarakat sekitar.

Pabrik garmen yang berlokasi di Jalan Lingkar Luar Pemalang, Desa Kabunan, Kecamatan Taman, tersebut kembali dijalankan oleh PT Wong Hang Bersaudara (WHB) pada Jumat (19/12/2025). Pengoperasian kembali ini menandai babak baru setelah seluruh aktivitas produksi sempat terhenti akibat kondisi keuangan perusahaan sebelumnya.

Di bawah kepemimpinan generasi keempat keluarga Wongso, yakni Stephen Wongso, Samuel Wongso, dan Alfindra Amanda, WHB menargetkan penyerapan hingga 1.500 tenaga kerja sampai akhir 2025. Saat ini, sekitar 1.300 karyawan telah kembali bekerja di pabrik tersebut, dengan mayoritas berasal dari wilayah Pemalang dan sekitarnya.

Kegiatan usaha yang dijalankan WHB tidak hanya terbatas pada sektor garmen. Perusahaan ini juga bergerak di bidang pabrik sepatu, konstruksi dan meubelair, mechanical electrical plumbing (MEP) dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3),

hingga layanan teknologi informasi dan periklanan. Diversifikasi usaha tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan bisnis sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Alfindra Amanda menyebut pengoperasian kembali pabrik ini sebagai titik balik penting, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi para pekerja dan keluarga mereka. Menurutnya, kebangkitan pabrik bukan sekadar soal mesin produksi yang kembali berjalan, melainkan tentang kehidupan ribuan keluarga yang kembali memiliki kepastian.

Ia menegaskan bahwa visi dan misi PT Wong Hang Bersaudara sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, terutama dalam upaya membuka lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan membangun kemandirian ekonomi nasional. Dengan beroperasinya kembali pabrik garmen ini, WHB berharap dapat berkontribusi nyata dalam pemulihan sektor industri padat karya serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Pematang.



Standar Hijau Jadi Batu Sandungan, Tekstil RI Terancam Kehilangan Pasar Eropa

Peluang produk tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia untuk menembus pasar Eropa melalui perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai

masih menghadapi tantangan besar. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai, ketentuan keberlanjutan yang melekat dalam perjanjian tersebut justru berpotensi menjadi hambatan serius bagi industri nasional, terutama terkait penggunaan energi.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa menjelaskan, standar industri hijau yang diterapkan Uni Eropa membatasi penggunaan energi berbasis fosil, termasuk batu bara, yang selama ini masih menjadi sumber energi utama bagi industri TPT. Sementara itu, alternatif energi yang tersedia dinilai belum sepenuhnya siap untuk menopang kebutuhan produksi dalam skala besar.

Menurut Jemmy, larangan penggunaan batu bara membuat industri berada dalam posisi dilematis. Ketersediaan gas sebagai alternatif utama masih terbatas, baik dari sisi pasokan maupun infrastruktur. Distribusi gas menggunakan tangki dinilai tidak efisien karena akan meningkatkan biaya produksi akibat tambahan ongkos logistik, sedangkan jaringan pipa gas belum menjangkau sentra-sentra industri tekstil.



Selain persoalan gas, opsi penggunaan biomassa dari cangkang sawit yang selama ini dipandang sebagai energi terbarukan juga menghadapi kendala. Pasar global, khususnya pemilik merek internasional, menolak penggunaan cangkang sawit karena dikaitkan dengan isu deforestasi. Padahal, secara teknis cangkang sawit merupakan

salah satu sumber biomassa yang dapat dimanfaatkan industri.

Jemmy menegaskan, industri TPT pada prinsipnya ingin bertransformasi menuju industri hijau dengan beralih dari batu bara ke gas pipa. Namun, keterbatasan infrastruktur energi membuat proses transisi tersebut berjalan lambat dan berisiko menyebabkan hilangnya pesanan ekspor ke Eropa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan industri tekstil tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait antara kebijakan perdagangan, energi, dan kesiapan infrastruktur nasional.

Dari sisi lain, Pembina API Maniwanen Marimutu menyoroti posisi industri TPT yang belum masuk dalam kategori industri strategis penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US\$6,5 per MMBTU. Akibatnya, biaya energi menjadi beban tambahan yang signifikan bagi pelaku usaha tekstil. Ia juga menekankan bahwa tidak semua pabrik mendapatkan suplai gas karena keterbatasan jaringan pipa, sehingga biaya energi kerap luput dari perhatian banyak pihak.

API mencatat, struktur biaya industri TPT saat ini sudah cukup berat. Sekitar 50 hingga 55 persen biaya produksi terserap untuk bahan baku, sementara sekitar 25 persen dialokasikan untuk tenaga kerja. Dengan komposisi biaya tersebut, ruang industri untuk menanggung kenaikan biaya energi menjadi semakin sempit.

Dengan berbagai kendala tersebut, API menilai manfaat IEU-CEPA berisiko tidak optimal bagi industri TPT nasional apabila tidak diiringi dengan dukungan kebijakan yang konkret serta percepatan pembangunan infrastruktur energi bersih. Tanpa langkah tersebut, produk tekstil Indonesia dikhawatirkan justru tersingkir dari

pasar Eropa yang semakin ketat dalam menerapkan standar keberlanjutan.

Kenaikan Upah 2026 vs Banjir Impor

Sejumlah kalangan pengusaha menyatakan keberatannya terkait formula kenaikan upah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Pasalnya koefisien alfa yang ditetapkan sebesar 0,5-0,9 jauh diatas usulan pengusaha yang sebesar 0,3-0,5. Kepastian kenaikan upah di 2026 yang masih berproses dimasing-masing daerah dengan mengikuti peraturan tersebut ditenggarai menjadi tambahan tekanan bagi industri.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa sudah pasti tekanan di 2026 akan semakin bertambah dan beresiko akan adanya penutupan pabrik. Namun Redma juga menegaskan bahwa kenaikan upah ini juga akan menaikkan dayabeli Masyarakat.

“Jadi setelah adanya kenaikan upah nanti, pekerjaan rumah utama kita adalah agar kenaikan dayabeli ini dinikmati oleh produsen lokal sehingga roda ekonomi berputar lebih cepat” ungkap Redma. “Jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya dimana setiap tahun konsumsi tekstil naik 4%-6%, tapi justru yang menikmati malah importir, devisanya lari keluar” tegasnya. Untuk itu Redma meminta Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, Kemendag dan Kemenperin yang disinergikan Kemenko Perekonomian untuk segera menyelesaikan masalah importasi ini.

Sebelumnya, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) menyatakan sikapnya dalam

mendukung formulasi kenaikan upah 2026. Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto menyatakan bahwa formulasi ini sudah sangat adil dan memberikan ruang bagi masing-masing daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi didaerahnya masing-masing.

KAHMI tekstil tidak menampik bahwa kenaikan upah ini akan membebani keuangan perusahaan ditengah tekanan pasar yang semakin besar, namun permasalahan utama sektor TPT adalah banjirnya barang impor akibat ulah oknum pejabat korup yang bermain mata dengan importir. “Jadi tidak fair jika ulah para bandit dibebankan pada tenaga kerja atas nama dayasaing” tegasnya.

Bahkan Agus menyayangkan sikap sebagian organisasi pengusaha yang takut mengungkapkan permasalahan sebenarnya bahkan cenderung mengikuti permainan para pejabat korup ini. “Makanya banyak organisasi pengusaha yang ngomongnya tidak konsisten, karena mereka tahu cara main pejabat korup, tapi mereka harus lindungi karena punya kepentingan lain” ucap Agus. “Ya itu urusan mereka, tapi jangan jadikan tenaga kerja sebagai tumbal yang mengatas-namakan daya saing” tegasnya.

Agus mengungkapkan bahwa permasalahan utamanya kan sudah jelas yaitu importasi ilegal yang harus diselesaikan oleh Kemenkeu dan importasi legal yang harus diselesaikan oleh Kemendag dan Kemenperin. “Kalau Kemenkeu sudah mengagendakan perbaikan Bea Cukai, kita tinggal tunggu langkah dari Kemendag dan Kemenperin dalam memperbaiki pemberian ijin dan kuota impornya” ujar Agus.

Agus menambahkan bahwa masalah kuota impor tekstil yang bertahun-tahun dijalankan tidak transparan tidak akan pernah selesai

selama oknum pejabat pengendali mafia kuota impor masih terus bercokol di dua Kementerian itu. “Jadi oknum pejabat di Kemenkeu saat ini sedang ketar-ketir, tapi oknum pejabat di Kemendag dan Kemenperin masih pesta pora karena merasa dilindungi menterinya, pas waktunya kenaikan upah, malah tenaga kerja yang mau ditumbalkan” pungkasnya.

Akses Kredit Seret, Industri Tekstil Nasional Hadapi Tekanan Berat



Upaya pemerintah dan pelaku usaha untuk membenahi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Selain tekanan dari produk impor dan peredaran barang ilegal, keterbatasan akses permodalan kini menjadi persoalan serius yang dirasakan langsung oleh pelaku industri.

Sejumlah pengusaha mengeluhkan sulitnya memperoleh pembiayaan dari perbankan. PT Mayer Indah Indonesia menyampaikan kondisi tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. General Manager PT Mayer Indah Indonesia, Melisa Suria, mengungkapkan bahwa sejak September hingga Desember perusahaannya telah mendatangi lebih dari 20 bank untuk mengajukan pinjaman modal kerja. Namun, seluruh pengajuan tersebut ditolak.

Menurut Melisa, perbankan menilai industri tekstil berada dalam kategori berisiko tinggi sehingga tidak menjadi prioritas

pembiayaan. Ia menyebut industri tekstil saat ini dianggap berada pada “lampu oranye hingga lampu merah”, yang membuat bank enggan menyalurkan kredit atau bantuan pembiayaan.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI). Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi, menyatakan bahwa persepsi risiko terhadap industri tekstil masih sangat kuat di sektor perbankan. Bahkan, ketika kredit berhasil diperoleh, bunga pinjaman yang dikenakan berkisar antara 10% hingga 13%, angka yang dinilai terlalu tinggi bagi pelaku industri.

Farhan menilai situasi ini menjadi kontraproduktif, mengingat industri tekstil saat ini tengah berada dalam fase transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Transformasi tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan dengan skema yang lebih kompetitif. Ia menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode krusial bagi keberlangsungan sejumlah perusahaan tekstil, khususnya di sektor hulu. Oleh karena itu, APSyFI mendorong adanya dukungan pemerintah dan perbankan melalui kebijakan kredit berbunga rendah.

Dari sisi industri garmen, Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) menilai berbagai persoalan yang membelit industri TPT merupakan akumulasi dari banyak faktor. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang dinilai kerap tidak konsisten serta kurang mendukung terciptanya iklim usaha yang efisien akibat banyaknya hambatan regulasi.

Persaingan industri TPT juga semakin ketat, baik di pasar ekspor maupun domestik. Tanpa dukungan nyata dari pemerintah serta lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI),

industri TPT nasional dinilai akan semakin tertinggal dibandingkan negara pesaing.

Tekanan terhadap pelaku usaha juga diperberat oleh rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 yang rata-rata mencapai 6% hingga 7%. AGTI menilai kenaikan upah tersebut berpotensi membebani pengusaha apabila tidak disertai dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya. Selain itu, pelaku industri juga meminta pemerintah untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan beban sertifikasi yang berlebihan karena seluruh biaya tersebut pada akhirnya terakumulasi dalam struktur biaya produksi.

Meski menghadapi berbagai tantangan, AGTI menegaskan bahwa industri TPT bukanlah industri yang sedang menuju senja. Namun, diakui bahwa kinerja industri tekstil nasional mengalami tren penurunan dalam hampir tiga dekade terakhir. Pada era 1980-an, Indonesia pernah menjadi salah satu negara acuan industri tekstil dunia dan menjadikan sektor ini sebagai industri strategis dalam mendorong kemandirian sandang.

Saat ini, posisi Indonesia tertinggal dari sejumlah negara Asia seperti China, Bangladesh, Vietnam, India, Pakistan, hingga Kamboja. Data menunjukkan bahwa pada 2024, ekspor tekstil Vietnam mencapai US\$44 miliar dan Bangladesh sebesar US\$38,48 miliar, sementara Indonesia hanya mencatatkan ekspor sekitar US\$11,9 miliar. Kendati demikian, AGTI menilai prospek industri TPT masih sangat terbuka apabila dilakukan pembenahan secara menyeluruh.

AGTI mendorong pemerintah untuk melakukan benchmarking ke negara-negara yang berhasil mengembangkan industri tekstilnya, seperti Vietnam dalam hal efisiensi rantai pasok dan integrasi investasi. Selain itu, Indonesia juga perlu belajar dari China, Thailand, dan Korea Selatan terkait

penguatan sistem ritel modern dan digitalisasi pasar, serta penyederhanaan regulasi perizinan.

Menurut AGTI, berbagai insentif dan kemudahan seharusnya tidak hanya difokuskan pada penanaman modal asing baru. Pelaku usaha lokal serta perusahaan PMA yang telah lama beroperasi dan berkontribusi di Indonesia juga perlu mendapatkan dukungan serupa agar industri tekstil nasional dapat kembali kompetitif di tengah persaingan global.

Pemerintah Kucurkan Pembiayaan Rp2 Triliun untuk Dorong Ekspor Tekstil dan Furnitur



Pemerintah menyiapkan pembiayaan khusus senilai Rp2 triliun bagi industri tekstil dan furnitur dalam negeri guna memperkuat kinerja ekspor kedua sektor tersebut. Skema kredit ini akan disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bunga kompetitif sebesar 6 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, kebijakan ini merupakan respons atas usulan pengusaha yang sebelumnya mengajukan kebutuhan pembiayaan hingga Rp16 triliun. Namun, pada saat itu pemerintah belum mampu memenuhi seluruh permintaan tersebut. "Sekarang kita siapkan Rp2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur," ujar Purbaya dalam taklimat media di kantornya, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Purbaya menegaskan bahwa fasilitas pembiayaan ini sudah dapat diakses oleh pelaku usaha melalui LPEI yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Meski demikian, kredit tersebut diprioritaskan bagi perusahaan yang memiliki orientasi ekspor. “Mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Itu yang saya janjikan, sudah bisa datang,” katanya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membahas dukungan pembiayaan bagi sektor furnitur dan elektronik. Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menyebutkan, pertemuan tersebut menyoroti kebutuhan deregulasi dan insentif, khususnya terkait pendanaan dengan bunga yang lebih rendah agar pelaku usaha bisa lebih kompetitif.

Menurut Anindya, sektor furnitur memiliki potensi besar di pasar global dengan nilai mencapai sekitar US\$300 miliar. Namun, kontribusi Indonesia masih tergolong kecil, yakni sekitar US\$2,5 miliar. Padahal, sektor ini menyerap sekitar 2,5 juta pelaku usaha yang sebagian besar merupakan UMKM. Karena itu, ia menilai dukungan pembiayaan murah harus dibarengi dengan asistensi akses pasar, termasuk ekspor dan pendampingan teknis.

“Kalau UMKM bukan hanya dananya harus murah dan tersedia, tapi juga perlu asistensi untuk akses pasar dan teknis, karena tantangannya berbeda dengan perusahaan besar,” ujar Anindya.

Melalui skema kredit Rp2 triliun ini, pemerintah berharap industri tekstil dan furnitur nasional mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar ekspor, serta memperkuat peran UMKM dalam rantai nilai global.

Fokus SDA, Pemerintah Tegaskan Tekstil RI Tak Dapat Fasilitas Tarif Nol Persen di AS



Pemerintah memastikan produk tekstil Indonesia tidak masuk dalam daftar komoditas yang memperoleh fasilitas pembebasan tarif bea masuk dalam skema kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, keringanan tarif hanya diusulkan untuk komoditas tertentu yang saat ini dikenakan bea masuk sekitar 19 persen.

Menurut Airlangga, komoditas yang diprioritaskan dalam negosiasi bukan berasal dari sektor manufaktur. Pemerintah lebih memfokuskan pembahasan pada produk berbasis sumber daya alam yang dinilai memiliki keunggulan komparatif serta kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional. Dengan demikian, produk manufaktur seperti tekstil tidak termasuk dalam usulan pembebasan tarif.

Sebagian komoditas yang diusulkan untuk memperoleh keringanan tarif sebelumnya telah tercantum dalam executive order pemerintah Amerika Serikat. Namun, Indonesia juga mengajukan tambahan komoditas strategis yang dinilai berpotensi memperkuat kinerja ekspor dan meningkatkan devisa negara.

Kelapa sawit menjadi salah satu produk utama yang diusulkan dalam skema tersebut. Selain itu, pemerintah juga mendorong komoditas pertanian lain seperti kopi, teh, dan kakao, yang memiliki rantai nilai kuat serta peran penting dalam perekonomian nasional.

Di sisi lain, Amerika Serikat menunjukkan ketertarikan untuk mendapatkan akses terhadap mineral kritis Indonesia. Airlangga menyebutkan, komunikasi dengan lembaga ekspor dan perusahaan AS yang bergerak di sektor mineral telah berlangsung. Pemerintah pun tengah menyiapkan mekanisme kerja sama yang tetap sejalan dengan kebijakan nasional.

Akses terhadap mineral kritis tersebut dipandang sebagai bagian dari proses tawar-menawar untuk memperdalam kerja sama ekonomi kedua negara, sekaligus menjaga kepastian pasokan bahan baku strategis bagi industri di Indonesia dan Amerika Serikat.

Pemerintah menargetkan penandatanganan dokumen Agreement on Reciprocal Tariff (ART) oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump dapat dilakukan pada akhir Januari 2026. Airlangga menyatakan, secara prinsip substansi utama kesepakatan telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Melalui realisasi ART, pemerintah berharap daya saing ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat dapat meningkat, meskipun produk tekstil tidak termasuk dalam daftar komoditas yang menikmati fasilitas bebas tarif.

Gelombang PHK Bayangi Industri Tekstil Nasional Sepanjang 2025

Sepanjang 2025, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) kembali berada dalam tekanan

berat. Bersama sektor garmen dan alas kaki, industri padat karya ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Tekanan tersebut sudah terasa sejak awal tahun, ditandai dengan langkah efisiensi perusahaan, penutupan lini produksi, hingga penghentian operasional pabrik di sejumlah kawasan industri, khususnya di Pulau Jawa.



Di Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah mencatat ribuan pekerja kehilangan pekerjaan pada Januari 2025. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono, menyebut sekitar 2.400 karyawan terdampak PHK di salah satu perusahaan tekstil. Proses tersebut, menurutnya, telah dibahas sejak Desember 2024 dan dilakukan dengan koordinasi bersama serikat buruh. Kasus ini menjadi gambaran awal dari tekanan yang kemudian meluas sepanjang tahun.

Situasi tersebut diperkuat oleh catatan serikat pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut bahwa dalam periode Januari hingga Februari 2025 saja, jumlah korban PHK telah melampaui 60.000 orang. PHK tersebut terjadi di berbagai sektor padat karya, termasuk tekstil, garmen, sepatu, dan elektronik, serta melibatkan sedikitnya 50 perusahaan. Dari jumlah itu, sekitar 15 perusahaan dilaporkan telah dinyatakan pailit.

Di sisi lain, data resmi pemerintah menunjukkan angka yang juga terus

meningkat. Berdasarkan portal Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga November 2025 tercatat 79.302 tenaga kerja terdampak PHK yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jumlah ini bahkan telah melampaui total PHK sepanjang 2024 yang mencapai 77.965 orang.

Namun, serikat pekerja menilai angka administratif tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat hingga Oktober 2025, sebanyak 126.160 pekerja anggotanya kehilangan pekerjaan. Presiden KSPN Ristadi menyatakan perbedaan angka ini terjadi karena masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan PHK secara resmi kepada pemerintah.

Menurut KSPN, sekitar 79 persen dari total PHK yang mereka catat berasal dari sektor tekstil, garmen, dan sepatu, atau setara hampir 100 ribu pekerja. Dominasi sektor ini menegaskan bahwa industri TPT masih menjadi kelompok paling rentan di tengah tekanan ekonomi, persaingan global, serta derasnya arus impor.

Gelombang PHK yang terus berlanjut menunjukkan bahwa persoalan di industri tekstil tidak semata menyangkut tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan rapuhnya ekosistem industri padat karya secara keseluruhan. Tekanan terjadi dari hulu hingga hilir, mulai dari industri serat dan benang hingga garmen yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Tanpa intervensi kebijakan yang lebih kuat dan

Libur Nataru Hambat Pengapalan, Industri Tekstil Hadapi Risiko Denda Ekspor

Kebijakan pembatasan operasional angkutan barang selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dinilai mengganggu kinerja ekspor industri tekstil nasional. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut larangan operasional angkutan barang yang berlaku sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 memaksa banyak eksportir menunda pengiriman hingga tahun berikutnya.

Pembina API Maniwanen Marimutu menjelaskan, pembatasan tersebut berdampak langsung pada jadwal pengapalan produk tekstil yang umumnya padat menjelang akhir tahun. Barang yang belum sempat dikirim sebelum larangan berlaku terpaksa tertahan dan menjadi stok. Kondisi ini tidak hanya mengganggu arus kas perusahaan, tetapi juga menimbulkan persoalan baru dalam hubungan dengan pembeli luar negeri.

Menurut Mani, buyer internasional menuntut ketepatan waktu pengiriman karena berkaitan dengan jadwal produksi dan distribusi di negara tujuan. Keterlambatan pengiriman berpotensi memicu negosiasi ulang kontrak, bahkan tidak menutup kemungkinan eksportir dikenakan sanksi atau denda kompensasi. Situasi tersebut membuat pelaku industri berada dalam posisi yang sulit dan penuh ketidakpastian.

API menilai kebijakan pembatasan angkutan barang tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi industri dalam negeri yang saat ini tengah tertekan, termasuk sektor tekstil. Pengusaha harus bekerja ekstra untuk berkomunikasi dan

bernegosiasi kembali dengan buyer agar keterlambatan pengiriman dapat dimaklumi. Namun, upaya tersebut tidak selalu mudah karena pasar global menuntut kepastian dan ketepatan waktu.

Sebagai informasi, pembatasan angkutan barang selama periode Nataru diberlakukan untuk kendaraan dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan atau gandengan, serta kendaraan pengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan. Setelah dilakukan evaluasi pada dua hari awal masa Angkutan Nataru 2025/2026, pemerintah memutuskan pembatasan di ruas jalan tol berlaku penuh selama 24 jam tanpa jeda hingga 4 Januari 2026. Sementara itu, di ruas jalan arteri atau non-tol, pembatasan tetap menggunakan skema window time, yakni kendaraan diperbolehkan melintas pada pukul 22.00 hingga 05.00 waktu setempat, dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Industri Tekstil Minta Akses Tarif Lebih Ringan ke Pasar AS



Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendesak pemerintah untuk mengupayakan tarif resiprokal yang lebih rendah bagi produk garmen dan tekstil Indonesia ke Amerika Serikat (AS). API berharap tarif tersebut dapat ditekan hingga nol persen atau setidaknya di bawah 19 persen, seiring hampir rampungnya perjanjian tarif resiprokal antara Indonesia dan AS yang saat ini hanya mengakomodasi komoditas sumber daya alam berbasis tropis.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya berpihak pada industri manufaktur, khususnya sektor padat karya seperti garmen dan tekstil. Padahal, sektor ini memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja dan menopang perekonomian nasional. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada sektor agro, tetapi juga memberikan perhatian serius kepada produk manufaktur yang menjadi tulang punggung ekspor.

Jemmy menekankan bahwa pasar AS merupakan tujuan ekspor terbesar bagi produk garmen dan tekstil Indonesia. Di tengah upaya perbaikan tata kelola industri padat karya pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akses pasar dengan tarif yang lebih kompetitif dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan kerja. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, daya saing industri nasional berpotensi terus tergerus.

API juga menyoroti ketatnya persaingan global di sektor garmen dan tekstil. Saat ini, tarif impor AS untuk produk garmen dan tekstil Indonesia berada di kisaran 19 persen, setara dengan Kamboja, Malaysia, dan Thailand, serta sedikit di bawah Vietnam yang mencapai 20 persen. Sementara itu, Laos dan Myanmar menghadapi tarif jauh lebih tinggi hingga 40 persen. Meski tarif resiprokal AS terhadap Indonesia terlihat lebih rendah, API menilai beban biaya lain membuat produk nasional tetap kurang kompetitif.

Menurut Jemmy, kombinasi biaya logistik, harga gas industri, kenaikan upah pekerja, serta suku bunga kredit perbankan membuat indeks kemahalan Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara pesaing. Ia mencontohkan China dan India yang mampu menjaga kekuatan industri padat karya salah

satunya melalui kebijakan suku bunga kredit yang rendah, sehingga biaya produksi dapat ditekan.

Lebih lanjut, API menegaskan pentingnya pembahasan lanjutan terkait tarif ekspor sebelum perjanjian dengan AS ditandatangani. Saat ini, API tengah mendorong peningkatan impor kapas asal AS melalui skema kerja sama imbal balik. Dengan skema tersebut, produk garmen dan tekstil Indonesia yang menggunakan bahan baku US Cotton diharapkan dapat memperoleh tarif nol persen atau setidaknya lebih rendah dari tarif acuan saat ini.

Jemmy menilai skema imbal balik ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, mulai dari peningkatan penerimaan pajak hingga kemampuan mempertahankan jutaan tenaga kerja di sektor padat karya. Ia menegaskan bahwa perjuangan API bukan semata demi kepentingan pengusaha, melainkan sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap keberlangsungan hidup jutaan pekerja yang menggantungkan penghidupan pada industri garmen dan tekstil.

Harga Minimum Impor Dinilai Belum Cukup Lindungi Industri Tekstil Nasional



Rencana pemerintah untuk mengatur harga acuan minimum terhadap barang impor

dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar yang dihadapi industri tekstil nasional. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menilai kebijakan tersebut masih lebih berorientasi pada peningkatan penerimaan negara dibandingkan upaya perlindungan nyata bagi industri dalam negeri yang tertekan oleh banjir produk impor murah.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menilai penetapan harga minimum memang berpotensi menambah pemasukan negara sekaligus menekan praktik kecurangan perdagangan, khususnya under invoicing. Namun, kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk mengatasi persoalan dumping yang selama ini menjadi ancaman serius bagi industri tekstil lokal. Produk dumping, menurut Redma, sejak awal telah diproduksi dengan biaya sangat rendah di negara asal sehingga tetap kompetitif meskipun dikenakan ketentuan harga acuan minimum.

Kondisi tersebut membuat produk impor dumping tetap membanjiri pasar domestik dan menekan daya saing industri dalam negeri. Bagi produk dumping, kebijakan harga minimum dinilai hanya berdampak pada peningkatan kewajiban pajak, tanpa mengubah struktur harga riil di pasar. Akibatnya, harga jual kepada konsumen tetap rendah dan tidak memberikan perlindungan yang signifikan bagi produsen lokal.

Meski demikian, APSyFI mengakui kebijakan harga acuan minimum memiliki sisi positif dalam penegakan aturan perdagangan. Kebijakan ini dinilai dapat merugikan importir yang selama ini memanfaatkan celah dengan praktik under invoicing, sekaligus memperbaiki tata kelola impor. Karena itu, APSyFI mendorong pemerintah agar kebijakan tersebut dilengkapi dengan instrumen lain, seperti penguatan

pengawasan anti-dumping dan kebijakan perdagangan yang lebih komprehensif.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih mengkaji rencana pengaturan harga acuan penjualan barang impor super murah yang masuk ke Indonesia. Kebijakan ini disiapkan untuk melindungi produk lokal agar mampu bersaing secara sehat di pasar domestik. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pembahasan masih dilakukan bersama Kementerian Perdagangan dan belum ada keputusan final.

Menurut Maman, masuknya barang impor murah, khususnya dari China, telah memberi tekanan besar pada produk lokal karena perbedaan harga yang signifikan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM kesulitan berkompetisi dan berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha jika tidak diantisipasi. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang impor, melainkan menciptakan persaingan yang adil agar produk dalam negeri tidak tersingkir di pasar sendiri.

